

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UU Republik Indonesia Tahun 1945. Kebijakan pembangunan tidak lepas dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan yaitu untuk meningkatkan taraf hidup yang baik bagi masyarakat. Sedangkan hakikat pembangunan itu sendiri adalah manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan seharusnya selain berwawasan sosial dan ekonomi juga harus berwawasan lingkungan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Skripsi, Ragil Agus Prianto, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jombang Kota Semarang*, Universitas Negeri Semarang, 2012, h. 1 dikutip tanggal 21 Desember 2017 pukul 10:13.

Menurut Munadjat Danusaputro, “lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk didalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya”.<sup>2</sup> Sementara itu, menurut Otto Soemarwoto lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup didalamnya.<sup>3</sup> Oleh karena itu masalah pembangunan tidak lepas dari masalah lingkungan hidup.

Permasalahan lingkungan tidak saja merupakan monopoli Negara maju atau Negara industry, tetapi juga negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Hanya saja permasalahan lingkungan hidup di negara berkembang berbeda dengan masalah lingkungan hidup yang dialami negara maju. Jika masalah lingkungan di Negara maju disebabkan oleh kemajuan dan perkembangan teknologi yang pesat, seperti dampak teknologi nuklir dan pencemaran limbah kimia dari perusahaan industry, maka di Negara berkembang masalah lingkungan terutama disebabkan oleh keterbelakangan pembangunan dan

---

<sup>2</sup> Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku I Umum*, (Jakarta: Binacipta, 1985),h.67

<sup>3</sup> Otto Soemarto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Djambatan, 1991),h.48

kemiskinan, yang ditandai oleh rendahnya mutu hidup dan kesadaran sosial.<sup>4</sup>

Salah satu permasalahan lingkungan hidup yang sering kali menjadi sorotan saat ini ialah masalah sampah. permasalahan sampah yang terlihat hingga saat ini yaitu sampah masih menjadi sumber polusi udara karena baunya, dan polusi air karna penanganan air lindinya yang kurang tepat, serta menjadi penyebab terjadinya wabah penyakit dan juga banjir. Itu berarti pengelolaan sampah yang tidak mempergunakan metode dan tehnik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan selain akan menimbulkan dampak negative terhadap kesehatan juga akan mengganggu kelestarian fungsi lingkungan baik lingkungan pemukiman, hutan, persawahan, dan sungai. Sedangkan pengelolaan lingkungan yang baik akan menghasilkan lingkungan yang bersih, teratur dan bisa meningkatkan pelestarian lingkungan itu sendiri.

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian mengenai pengelolaan kebersihan di Desa Domas yaitu salah satu desa di Kecamatan Pontang yang merupakan wilayah Provinsi Banten tepatnya di Kabupaten Serang. Pengelolaan sampah di Kabupaten Serang selama ini sebenarnya mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor

---

<sup>4</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2014),h.8

11 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Kebersihan. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pengelolaan sampah, meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha, organisasi pengelolaan sampah, dan kelompok masyarakat yang bergerak dibidang persampahan yang dapat diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Namun fakta yang terjadi saat ini, masih saja banyak masyarakat maupun lembaga hukum di Desa Domas yang tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah, kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan kebijakan yang ada.

Masyarakat masih saja membuang sampah pada aliran irigasi yang seharusnya dijadikan sumber perairan untuk bercocok tanam, dengan terjadinya hal ini banyak penumpukan sampah yang berada di badan air atau aliran air tersebut. Ketidakikutsertaan masyarakat dalam memelihara lingkungan hidupnya akan mengakibatkan lingkungan itu menjadi penghambat pembangunan, artinya bahwa partisipasi masyarakat dan kepedulian Pemerintah dalam pengelolaan sampah

sangat dibutuhkan demi terwujudnya lingkungan hidup yang baik, sehat dan bersih. Dengan latar belakang seperti yang telah dijelaskan penulis mengambil judul “ Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kebersihan Dalam Penanggulangan Kasus Sampah (Studi di Desa Domas Kec.Pontang Kab. Serang-Banten)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam melakukan kegiatan sehari-hari seseorang pasti menghasilkan sampah, baik yang dihasilkan oleh perumahan maupun pabrik-pabrik. Permasalahan pengelolaan persampahan menjadi sangat serius akibat kompleksnya permasalahan yang terjadi dan kepadatan penduduk yang tinggi. Kebijakan yang dibuat oleh Kabupaten Serang yaitu Peraturan Daerah Nomor. 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kebersihan seharusnya mampu menjadi alat untuk membantu terkait permasalahan lingkungan khususnya di Desa Domas yang memiliki kasus sampah. Dalam Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa “Setiap orang dan atau Badan yang berada di Kabupaten Serang wajib memelihara dan menjaga kebersihan”. Maka, keselarasan akan kesadaran baik pihak masyarakat maupun Badan Hukum yang berwenang sangat diharapkan,

akan tetapi dalam hal ini masih ada beberapa hal yang menjadi sorotan masalah.

Oleh karena itu, Berdasarkan uraian seperti yang ditelaah dikemukakan oleh peneliti di atas, maka rumusan masalah yang disajikan dalam penelitian ini adalah ;

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang No.11 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Kebersihan Dalam Penanggulangan Kasus Sampah ?
2. Apa saja faktor-faktor pendorong dan penghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang No.11 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Kebersihan Dalam Penanggulangan Kasus Sampah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ilmiah bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan mengkaji kebenaran atas suatu objek penelitian. Mengembangkan berarti mengkaji dan memperluas lebih dalam pengetahuan dan kebenaran baik dalam sudut pandang seseorang maupun dalam pengetahuan dan ilmu yang sudah ada sebelumnya. Untuk itu tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kebersihan Dalam Penanggulangan Kasus.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa saja faktor-faktor pendorong dan penghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang No.11 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Kebersihan Dalam Penanggulangan Kasus Sampah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian yang berjudul analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang No.11 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Kebersihan Dalam Penanggulangan Kasus Sampah adalah :

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan pengetahuan karena akan menambah informasi juga ragam pengetahuan dalam dunia akademis ilmu Hukum Tata Negara dan bagi ilmu pengetahuan lainnya ,penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan kontribusi berkaitan dengan analisis Implementasi

Peraturan Daerah Kabupaten Serang No.11 Tahun 2007  
Tentang Pengelolaan Kebersihan.

2. Secara praktisi

Secara praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan pengetahuan bagi mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten juga pemerintah daerah setempat tentang bagaimana cara mengatasi masalah terkait masalah pengelolaan sampah.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

- 1) Nama : Iin Indah Sari  
Nim : 6661082043  
Universitas : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12  
Tahun 2002 Tentang Pengelolaan  
Persampah/Kebersihan Di TPA Jatiwaringin  
oleh Dinas Kebersihan dan Pemakaman  
(DKKP) Kabupaten Tangerang.  
Tahun : 2012 M



Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh IIN INDAH SARI dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Persampah/Kebersihan Di TPA Jatiwaringin oleh Dinas Kebersihan dan Pemakaman (DKKP) Kabupaten Tangerang”**, pada konsentrasi Ilmu Management Publik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu social dan Ilmu Politik UNTIRTA. Beliau melakukan penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Persampah/Kebersihan Di TPA Jatiwaringin oleh Dinas Kebersihan dan Pemakaman (DKKP) Kabupaten Tangerang.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif karena menurutnya berdasarkan pengamatan atau observasi awal yang beliau lakukan, ternyata masalah yang sedang dihadapi lebih sesuai untuk diteliti dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini tersebut menunjukkan bahwa secara operasional implementasi pengelolaan sampah di TPA jatiwaringin mengacu pada pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa pengelolaan sampah di TPA harus meliputi pekerjaan

pemusnahan, pengomposan, dan pemilihan sampah untuk pemanfaatan kembali.

Adapun hasil dari implementasinya bahwa pemusnahan sampah sudah cukup membaik, hal ini dilihat dari pola pengoperasian dengan system pemusnahan *Sanitary Landfill* sudah mulai berjalan, dimana sudah terdiri dari kegiatan pendataan sampah, pengangkutan sampah, pemadatan sampah, dan penutupan sampah dengan tanah. Hanya saja dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa ada beberapa alasan penghambat proses pengelolaan sampah seperti kualitas dari alat-alat berat yang kurang baik, serta dalam kegiatan pengomposan dan pemilihan sampah untuk pemanfaatan kembali belum dilakukan. Adapun dalam hal kesadaran dan peran serta masyarakat untuk menjaga dan memelihara kebersihan masih terlihat sangat kurang, hal ini dapat dilihat dari kurang adanya peran serta masyarakat dalam menerapkan pengelolaan sampah dengan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam kehidupan

sehari-hari sebagai wujud strategi dalam meminimalisir volume sampah.<sup>5</sup>

- 2) Nama : Dedi A. Bardani  
Nim : 062050494  
Universitas : Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor  
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Bandung.  
Tahun : 2010 M

Kebijakan pengelolaan sampah yang dilaksanakan di Kota Bandung saat ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Kebijakan pengelolaan sampah perkotaan yang diterapkan di Kota Bandung saat ini mengarah pada sampah sebagai sumber pendapatan daerah yang dilaksanakan dalam bentuk berdirinya BUMD Perusahaan Daerah Kebersihan. Kebijakan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Bandung belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. factor-faktor dominan yang mempengaruhi

---

<sup>5</sup> Iin Indah Sari, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan di TPA Jatiwaringin Oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKKP) Kabupaten Tangerang*: (Serang, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2012).

pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah perkotaan di Bandung :  
**Pertama**, Faktor disposisi terdiri dari a) penerapan b) sikap aparat dan c) keinginan aparat; **Kedua**, factor sumberdaya terdiri dari a) sumber informasi b) peralatan; **Ketiga** factor komunikasi yang terdiri dari: a) sosialisasi, b) media, c) potensi lokasi dan d) potensi media.

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman prioritas kebijakan dalam mengurangi sampah di kota Bandung adalah dengan melakukan sosialisasi, pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan media komunikasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menambah sarana. Pemerintah Kota Bandung perlu membuat kebijakan untuk pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah, dengan demikian perlu adanya reservasi terhadap Perda No. 2 Tahun 1984 tentang PD Kebersihan, Perda No. 27 Tentang Pengelolaan Kebersihan, dan Perda No. 11 Tahun 2005 tentang K3.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Dedy A. Bardani, *Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Bandung*: (Bogor, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2010).

- 3) Nama : Ragil Agus Prianto  
Nim : 3450406574  
Universitas : Universitas Negeri Semarang  
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah  
Di Kelurahan Jombang Kota Semarang ( Analisis  
Sosio Yuridis Pasal 28 Undang-Undang No. 18  
Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah).  
Tahun : 2011 M

Bentuk-bentuk regulasi terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Semarang adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, peraturan ini masih diberlakukan di Kota Semarang meskipun telah ada Undang-undang yang baru yaitu Undang-undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008, namun setelah disyahrkannya Undang-undang tersebut sekarang Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan sampah belum juga disyahkan padahal telah diatur dalam pasal 47 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang diamanatkan Undang-undang ini diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan.

Bentuk mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Jombang Kota Semarang yaitu dimulai dari proses tahap Perencanaan yaitu mengidentifikasi masalah mengenai pengelolaan sampah kemudian mempersiapkan untuk membuat suatu keputusan dan kesepakatan antara Pemerintah dan masyarakat. Tahap implementasi pada tahap ini pemerintah bekerjasama dengan stakeholder untuk mengadakan sosialisasi tentang bentuk regulasi pengelolaan sampah. selanjutnya pada tahap Pengawasan dan Pengendalian dalam pelaksanaan pengawasan pemeliharaan dan peningkatan disiplin masyarakat perlu stakeholder melaporkan hasil kegiatan monitoring yang dilakukan pengelola membuat laporan, untuk disampaikan ke pemerintah maupun masyarakat sesuai aturan atau mekanisme yang disepakati.<sup>7</sup>

## **F. Kerangka Pemikiran**

Peraturan Daerah dibentuk karena ada kewenangan yang dimiliki daerah otonom dan perintah dari peraturan perundangan yang lebih tinggi. Kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38

---

<sup>7</sup> Ragil Agas Prianto, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jombang Kota Semarang ( Analisis sosio yuridis pasal 28 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah)*, (Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2011).

Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.<sup>8</sup>

Lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kebersihan merupakan suatu tonggak baru bagi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Serang. Dalam hal ini Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat tidak awam akan kebijakan tersebut. Menurut Grindle, implementasi sering dilihat sebagai suatu prose yang penuh dengan muatan politik dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin mempengaruhinya.<sup>9</sup>

Dalam Pasal 13 Peraturan Daerah No 11 Tahun 2007 menjelaskan bahwa “Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat untuk memelihara dan menjaga kebersihan secara

---

<sup>8</sup> Halim Hamzah dan Kemal Redindo Syahrul Putra, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manual)*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2009),h.1.

<sup>9</sup> Samudra Wibawa, *Evaluasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Rajawali Press, 1994), h.22.

terus menerus diadakan pembinaan secara berkala berupa kegiatan penyuluhan”, artinya adalah bahwa pemerintah atau badan hukum seharusnya memberikan sosialisasi terstruktur terkait kebijakan pengelolaan kebersihan yang sudah dibuat. Hal ini bertujuan agar masyarakat mempunyai kesadaran akan kebersihan lingkungan khususnya pengelolaan sampah yang baik dan benar. Disisi lain kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah juga perlu terus ditingkatkan serta didorong menuju perilaku hidup sehat dan tertib.<sup>10</sup>

Pada dasarnya sampah adalah salah satu permasalahan lingkungan yang hingga saat ini masih terjadi di kota-kota besar hingga daerah-daerah pesisir khususnya di Desa Domas yang akan menjadi Objek Penelitian. Sampah merupakan bahan padat buangan dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makam, industry, puingan bahan bangunan dan besi-besi tua bekas kendaraan bermotor. Bisa dikatakan bahwa sampah merupakan hasil sampingan dari aktivitas manusia yang sudah terpakai.<sup>11</sup> Seharusnya, upaya dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah tersebut dapat diatasi dengan perumusan dan

---

<sup>10</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Sampah

<sup>11</sup> Cecep Dani Sucipto, *Tekhnologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*, (Yogyakarta: Gosyen Publishin, 2012), h.1.



penerapan suatu kebijakan. Kebijakan public yang dibuat oleh pemerintah daerah mengenai pengelolaan sampah tidak akan optimal jika tidak didukung oleh peran serta masyarakat.<sup>12</sup>

Permasalahan sampah yang sering muncul selama ini, tidak membuat seluruh *stakeholder*<sup>13</sup> yang bertanggung jawab memiliki kepekaan untuk mengatasi masalah tersebut. Tidak jarang kita temukan di beberapa wilayah, bahwa instansi yang bertugas dalam penanganan sampah kurang mampu mengatasi persoalan tersebut, sehingga pengelolaan sampah tidak berjalan secara efektif bahkan dapat memberikan dampak negative bagi kesehatan serta lingkungan karena tehnik pengolahannya yang tidak ramah lingkungan, seperti yang terjadi di Desa Domas Kecamatan Potang Kabupaten Serang, dimana minimnya anggaran, fasilitas, serta kesadaran yang ada membuat pengolahan sampah selama ini belum optimal. Hal ini dilihat dari system pemusnahan sampah yang tidak ramah lingkungan, kondisi sarana prasarana yang kurang memadai, belum diterapkannya tehnik pengolahan sampah, Oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi upaya pemerintah dalam penerapan kebijakan peraturan yang sudah dibuat.

---

<sup>12</sup> Cecep Dani Sucipto, *Tekhnologi Pengolahan....*,h.2.

<sup>13</sup> Menurut ISO 2600 SR, Stakeholder didefinisikan “individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keputusan serta aktifitas Organisasi.

Berdasarkan masalah yang diperoleh dari observasi awal dan wawancara yang sudah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa identifikasi masalah yaitu antara lain:

1. Masih diterapkannya system pemusnahan sampah dengan *Open Dumping*<sup>14</sup> yang tidak ramah lingkungan karena sampah dibiarkan begitu saja dilahan terbuka tanpa dilakukan upaya penanganan lebih lanjut. Dalam kasus ini hanya sedikit saja masyarakat yang dapat berinisiatif sendiri dalam pengolahan sampah, seperti misalnya membakar sampah di lahan yang terbuka, selebihnya mereka membuang sampah rumah tangga pada badan air irigasi yang terdapat dipinggir jalan.
2. Tidak adanya pengembangan pengelolaan sampah dalam melakukan pemilahan sampah untuk pemanfaatan kembali.
3. Belum adanya wacana untuk mengubah paradigma pengelolaan sampah.
4. Masih rendahnya jangkauan pelayanan pengelolaan sampah.

---

<sup>14</sup> Open Dumping System adalah system pembuangan sampah terbuka yang hanya dibiarkan menumpuk tanpa adanya upaya pengolahan lebih lanjut.

5. Masyarakat belum mengetahui bentuk atau system pengelolaan sampah rumah tangga atau individu, yang baik atau benar, baik itu sampah kering atau sampah basah.
6. Kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah secara optimal yang dilakukan pemerintah terkait hak dan kewajiban kepada para instansi-intansi yang memang memiliki kewenangan dalam mengemban amanah tersebut.
7. Pengelolaan sampah belum merupakan prioritas.

Permasalahan tersebut diatas apabila tidak dipikirkan konsep-konsep penanggulangannya mulai dari sekarang, dimungkinkan menjadi permasalahan yang semakin rumit dan kompleks di kemudian hari.

### **G. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara tringaulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>15</sup>

Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kejadian social. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapatkan setelah dilakukan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang abstrak sifatnya tentang kenyataan-kenyataan khusus kemudian di abstraksikan dalam bentuk kesimpulan yang umum.<sup>16</sup>

### 1. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data<sup>17</sup>. Dalam teknik pengumpulan data peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

#### a. Study Kepustakaan (*Library Research*)

Study kepustakaan ini diperoleh dengan jalan membaca, mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan, dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

---

<sup>15</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cet. XII*, (Bandung : Alfabeta 2015), h.9

<sup>16</sup> Sugiono, *Metode Penelitian*,...,h. 34

<sup>17</sup> Sugiono, *Metode Penelitian*,...,h. 224

b. Observasi

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.<sup>18</sup>

Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi non partisipan karena dalam penelitian ini peneliti tidak terlibat untuk membantu masyarakat dan dinas yang berkewajiban dalam menangani permasalahan sampah serta tidak terlibat dalam aktivitas sebagai pemulung atau pemilah sampah. Peneliti hanya melakukan pengamatan saja untuk mengetahui kondisi objek penelitian.

c. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari

---

<sup>18</sup> Sugiono, *Metode Penelitian*,...,h. 145

seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.<sup>19</sup>

d. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak penulis kaji, berupa catatan, notulen rapat, agenda dan data lain yang bersifat documenter.<sup>20</sup>

2. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan ini dilaksanakan di Desa Domas Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Provinsi Banten.

3. Jenis dan Sumber Data

Data sekunder yang dibutuhkan antara lain berkaitan dengan produk-produk peraturan berkaitan dengan kebijakan pengelolaan sampah yang berlaku di Desa Pontang sebagai acuan dalam pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan sampah di Desa Domas. Selain itu data sekunder lainnya yang dibutuhkan berkaitan dengan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, jumlah pegawai instansi berkaitan dengan persampahan,

---

<sup>19</sup> Mulyana Deddy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h.180

<sup>20</sup> Mulyana Deddy, *Metode Penelitian*, ..., h. 158.

lokasi-lokasi TPS, alternatif-alternatif penanganan sampah, dan lain-lain.

Data primer yang diperlukan terdiri dari pendapat/pandangan masyarakat tentang pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah dan kebersihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui instansi-instansi terkait, serta sejauh mana kesadaran masyarakat akan kasus sampah di Desa Domas Kec. Pontang tersebut.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Penulisan penelitian ini dibagi dalam lima bagian yang masing-masing terdiri dari sub-bagian, yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, ini berisi Latar Belakang yang menggambarkan ruang lingkup dan kedudukan masalah yang akan diteliti dalam bentuk uraian secara deduktif, dari lingkup yang paling umum ke masalah yang lebih khusus, yang relevan sesuai judul skripsi. Selain latar belakang masalah, bab pendahuluan ini berisi focus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian ini dibuat dan manfaat penelitian yang berisi uraian manfaat secara teoritis dan praktis, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II yaitu Kondisi Objektif Desa Domas Kecamatan Pontang Kabupaten Serang-Banten yang terdiri atas Sejarah Desa Domas, Visi-Misi, Kondisi Geografis dan Demografis, Data Umum, Data Personil, Data Kewenangan, Data Keuangan, Data Kelembagaan, Tantib dan Bencana serta Budaya.

Bab III Landasan Teoritis Peraturan Daerah, yang terdiri dari : Implementasi dalam kebijakan publik, pengertian peraturan daerah, manfaat dan fungsi peraturan daerah, pembentukan peraturan daerah, pengertian sampah.

BAB IV Pelaksanaan PERDA NO. 11 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Penanggulangan Sampah di Desa Domas Kec. Pontang Kab. Serang-Banten dan Faktor penghambat serta pendukung Pelaksanaan PERDA NO. 11 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Penanggulangan Sampah di Desa Domas Kec. Pontang Kab. Serang-Banten

BAB V Penutup : menyajikan Kesimpulan yang didasarkan pada analisis dan pembahasan yang dilakukan. Kesimpulan ini mengacu pada tujuan penulisan, yaitu untuk mengetahui dan memberikan gambaran hasil akhir dari penelitian ini, Saran-saran serta Lampiran-lampiran.